

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Penelitian ini tentang pengembangan kurikulum MBKM model kolaborasi *Pentahelix* pada program studi pendidikan kewarganegaraan. Terdapat simpulan yang terbagi menjadi dua, yaitu simpulan umum dan simpulan khusus. Pada simpulan umum, akan dideskripsikan tentang hasil penelitian secara umum atau bersifat universal, sehingga tidak dikategorisasikan berdasarkan pada rumusan masalah penelitian. Pada simpulan khusus akan dideskripsikan tentang hasil penelitian yang secara khusus atau bersifat eksplisit, karena berdasarkan pada rumusan masalah yang ditetapkan. Maka pada penelitian ini akan dideskripsikan dan disampaikan, sebagai berikut:

5.1.1 Simpulan Umum

Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Program Studi Pendidikan kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia, mampu memberi gambaran mengenai pengembangan dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Realisasi kebijakan pengembangan Kurikulum MBKM di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan adalah tahap merintis. Karena setiap Prodi berupaya untuk menerapkan kampus merdeka. Walau pada realisasinya masih terdapat berbagai kekurangan, tetapi peneliti berpandangan bahwa merintis Kurikulum MBKM dengan penuh komitmen dan konsistensi, menjadi modal sosial dalam mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai kampus yang merdeka, berkualitas dan modern. Sehingga kurikulum MBKM ini bisa direalisasikan secara bertahap, meskipun masih terdapat berbagai kendala, khususnya konversi nilai mata kuliah, jumlah bobot SKS, sosialisasi, penyesuaian kalender akademik, dan MOU kerjasama dengan mitra. Perguruan Tinggi khususnya Program Studi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program MBKM sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MBKM, yaitu (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Praktik Kerja Profesi, (3) Asistensi Mengajar di

Isma Muslihati Saleha, 2023

PENGEMBANGAN KURIKULUM MBKM MODEL KOLABORASI PENTAHHELIX PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, (8) Proyek/Membangun Desa, dan (9) Pelatihan Bela Negara. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berupaya dalam memenuhi hak belajar tiga semester di luar program studi secara sukarela (dapat diambil atau tidak oleh mahasiswa) yang dalam riset ini, difokuskan pada pengembangan kurikulum, strategi dari program studi dan kolaborasi model *Pentahelix*.

Penyesuaian kebijakan MBKM sejalan dengan visi dan misi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Adanya Kebijakan MBKM direspon positif oleh Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan citra prodi tinggi sebagai penyelenggara MBKM. Dari segi rasionalitas, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan telah mengembangkan dan menerapkan Kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur pada Permendikbud RI No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Kolaborasi kerja sama mitra model *Pentahelix* merupakan salah satu strategi implementasi MBKM, dimana untuk mewujudkan 9 program MBKM program studi harus melakukan kerjasama yang saling terintegrasi dan sinergi dengan kalangan masyarakat, pemerintahan, dunia industri dan dunia usaha serta media. Kerjasama ini dilakukan untuk tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan melalui rencana strategis program studi agar visi dan misi prodi terpenuhi. Tujuan dibangunnya desain model MBKM menggunakan model *Pentahelix* adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar mahasiswa lulusan Prodi PKn siap dalam menghadapi new normal di era revolusi industri 4.0 yang dapat memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, kemampuan manajemen manusia, bisa berkoordinasi dengan orang lain, kecerdasan emosional, kemampuan menilai dan mengambil keputusan, berorientasi mengedepankan pelayanan, kemampuan negosiasi, dan fleksibilitas kognitif serta memiliki daya saing.

5.1.2 Simpulan Khusus

5.1.2.1 Verifikasi pada bagian pembahasan rumusan masalah satu tentang kondisi objektif pengembangan kurikulum MBKM selama ini di Prodi PKN, mengarah pada:

- 1) Kebijakan mengenai kurikulum MBKM pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan mendapat respon pro dan kontra khususnya di tengah-tengah para dosen. Namun kebijakan kurikulum MBKM ini harus tetap di implementasikan, sehingga prodi dengan berbagai upaya melakukan sosialisasi kepada dosen-dosen agar bisa bersinergi dan mensukseskan kurikulum MBKM ini. Hal ini dikarenakan adanya konversi nilai dari mata kuliah dosen pengampu dengan program MBKM yang sudah diikuti oleh mahasiswa. Sehingga konversi ini harus difasilitasi oleh prodi agar memenuhi standar program MBKM dan mendorong para dosen agar ikut serta dalam memberi kemudahan mengkonversi nilai mata kuliah sejumlah 20 SKS.
- 2) Pada proses penilaian pembelajaran di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kegiatan MBKM dibuatkan tim khusus yang menangani kegiatan MBKM. Tim ini berkewajiban mendampingi dan memfasilitasi mahasiswa dalam proses kegiatan MBKM dan penilaian menjadi konversi nilai mata kuliah. Mekanisme yang diterapkan saat ini, yang pertama mahasiswa harus lapor diri terlebih dahulu ketika mengikuti kegiatan MBKM, kemudian dilihat mata kuliahnya apa saja yang akan dikonversikan nanti di akhir. Selama menjalankan program nanti akan ada penilaian dari nasional yang harus diserahkan mahasiswa berupa bukti nilai program MBKM yang diikuti, laporan akhir, dan sertifikat programnya. Setelah itu baru dibuatkan surat pengantar dari prodi untuk bisa konversi nilai ke universitas.
- 3) Terjadi penurunan motivasi mengikuti kegiatan MBKM yang diadakan skala nasional seperti program Kampus Mengajar periode empat dan lima di Tahun 2022 ini. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, pertama karena sistem kampus mengajar yang cukup berbeda yaitu penempatan lokasi kegiatannya yang ditentukan oleh sistem sehingga mahasiswa tidak dapat

memilih lokasi terdekatnya atau yang bisa dijangkau oleh dirinya, kedua karena kekhawatiran untuk mengkonversi nilai, dan ketiga lebih memilih mengontrak mata kuliah yang dibutuhkan untuk menunjang dalam pembuatan tugas akhir atau skripsi.

5.1.2.2 Verifikasi pada bagian pembahasan rumusan masalah kedua tentang strategi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencapai kompetensi lulusan, berfokus pada:

- 1) Pada kurikulum MBKM ini terjadi perubahan diantaranya pada mata kuliah dan jumlah SKS setiap mata kuliah. Dalam pengembangannya, melibatkan seluruh stakeholder yang ada seperti ahli kurikulum, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. Penerapan MBKM ini juga berpengaruh pada perubahan profil lulusan, capaian pembelajaran, capaian kompetensi lulusan, dan lain sebagainya agar sesuai dengan tuntutan MBKM yang sudah disepakati oleh dewan dosen dan seluruh stakeholder.
- 2) Strategi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam menyesuaikan program MBKM dengan capaian kompetensi lulusan berdasarkan SNPT, berorientasi KKNI, dan menggambarkan visi, misi Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi. Dalam pengembangan program MBKM, melibatkan seluruh stakeholder yang ada seperti ahli kurikulum, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. Sehingga penerapan MBKM ini juga berpengaruh pada perubahan capaian kompetensi lulusan.
- 3) Pengembangan MBKM di program studi PKn dalam memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya difasilitasi dengan dibentuknya tim khusus MBKM. Sehingga mahasiswa dapat mendapatkan haknya meskipun tidak diwajibkan untuk mengikuti program MBKM ini. Program studi berkewajiban untuk mensosialisasikan, memfasilitasi, dan mendukung program MBKM ini sehingga mahasiswa tidak ketinggalan informasi. Dalam program MBKM ini tidak hanya kaprodi, dosen, dan tim khusus MBKM yang dituntut perannya, namun mahasiswa juga harus turut serta mandiri dalam mendapatkan informasi program MBKM khususnya program yang berskala nasional.

5.1.2.3 Verifikasi pada bagian pembahasan rumusan masalah ketiga tentang model pengembangan kurikulum MBKM dengan model kolaborasi *Pentahelix*, berfokus pada:

- 1) Pada kurikulum MBKM ini, hal yang paling mendasar dalam pengembangannya adalah kerjasama atau kolaborasi antara berbagai pihak. Program studi harus membuka dan mencari kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya dengan sesama universitas, pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan lain sebagainya. Kolaborasi atau kerjasama prodi dengan berbagai pihak sudah tercipta bahkan sebelum diberlakukan kurikulum MBKM. Namun yang membedakan, setiap kolaborasi yang terjalin harus di MOU kan, sehingga terdapat kekuatan hukum dan legalitas aturan yang jelas.
- 2) Kolaborasi *Pentahelix* dalam mengembangkan kurikulum MBKM tentunya sangat dibutuhkan untuk terwujudnya tujuan kurikulum MBKM yaitu untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul dan memiliki berkepribadian. Pihak yang terlibat kolaborasi *Pentahelix* ini diantaranya akademisi atau pakar, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan media. Adanya sinergi kolaborasi *Pentahelix* ini diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya. Berkaitan dengan kolaborasi *Pentahelix* pada dasarnya masih bersifat semu di Indonesia. Hal ini karena pada faktanya dari kelima unsur *Pentahelix* yang paling dominan yaitu unsur pemerintah. Pada prinsipnya untuk mewujudkan kolaborasi *Pentahelix*, seluruh unsur harus memiliki porsi yang sama.

5.1.2.4 Verifikasi pada bagian pembahasan rumusan masalah keempat tentang model pengembangan kurikulum MBKM dengan model kolaborasi *Pentahelix*, berfokus pada:

- 1) Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan sudah mengimplementasikan model kolaborasi *Pentahelix* jauh sebelum adanya kurikulum MBKM. Pengembangan kurikulum MBKM dengan model kolaborasi *Pentahelix* sudah pernah dicoba dalam beberapa kegiatan MBKM salah satunya

pertukaran mahasiswa yang ada di prodi berkolaborasi dengan sesama prodi di universitas lain. Namun hal ini ditemukan beberapa kendala misalnya nama mata kuliah, keberadaan di semesternya, bobot SKS nya tidak sama atau tidak terpenuhi bobot 20 SKS. Sedangkan pertukaran mahasiswa antar berbeda prodi, yang menjadi kendala adalah dasar keilmuan yang tidak dipelajari, kultur atau kebiasaan dosen yang berbeda, dan adanya kesadaran mahasiswa bahwa terjadi inkonsistensi pada jurusan yang diambil dengan mata kuliah MBKM yang berbeda keilmuan.

- 2) Cara Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengembangan Kurikulum MBKM dengan Model Kolaborasi *Pentahelix* dengan adanya keterbukaan untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak. Program studi wajib mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang salah satu isinya bahwa prodi harus ada MOU dengan instansi lain. Kolaborasi sudah terlaksana jauh sebelum diberlakukannya kebijakan MBKM, hal ini sudah menjadi awal dalam menjalin kolaborasi dengan unsur *Pentahelix*.

5.2 Implikasi

Pada dasarnya, hasil penelitian tentang tentang pengembangan kurikulum MBKM model kolaborasi *Pentahelix* pada program studi pendidikan kewarganegaraan, tentu memiliki implikasi penelitian, yaitu teoretis juga praktis. *Pertama*, pada aspek teoritis, riset ini berhasil merealisasikan *novelty* pertama, yaitu ter konstruksinya pengembangan kurikulum MBKM dalam perspektif Program Studi PKn, secara utuh juga representatif, lalu berhasil merealisasikan *novelty* kedua yaitu, dikembangkannya kurikulum PKn pada kampus merdeka, yang berbasis penguatan kompetensi lulusan, dan yang ketiga yaitu, pengembangan kurikulum dengan model kolaborasi *Pentahelix* juga dua *applied theory*, yang berhasil peneliti bangun, guna memperkuat teori progresivisme pendidikan, khususnya pada ranah pendidikan tinggi, yang masih minim di Indonesia. *Kedua*, pada aspek praktis, tentu penelitian ini berhasil merealisasikan kolaborasi keilmuan PKn dengan kampus merdeka, pada praktis pembelajarannya, yang bersifat komprehensif, baik dilakukan di dalam kelas, juga bersifat langsung di masyarakat, sebagai penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, kolaborasi *Pentahelix*

untuk mengatasi pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi yang sebatas pragmatis juga prosedural, agar bersifat komprehensif bahkan substantif, serta merealisasikan *citizenship education* sebagai gerakan filantropi melalui kampus merdeka, guna menjadi paradigma baru pembelajaran PKn bersifat praktis. Tentu agar bersifat representatif, implikasi penelitian akan dideskripsikan.

5.2.1 Implikasi Teoretis

- 1) Tersusunnya indikator ilmiah untuk kebijakan kampus merdeka, sebagai upaya mengatasi distorsi makna kampus merdeka, akibat diberlakukannya SE Kemendikbud No. 1035/E/KM/2020, mengarah terhadap: kemerdekaan belajar, pembelajaran berfokus kepada mahasiswa, penguatan kompetensi kewarganegaraan juga peningkatan inovasi nasional, pengembangan minat juga bakat mahasiswa, kemudahan akreditasi dan jejaring, Perguruan Tinggi yang modern, dengan mengakomodir revolusi industri 4.0, serta penguatan pergerakan mahasiswa.
- 2) Terkonstruksinya pengembangan kurikulum MBKM dalam perspektif PKn, sebagai berikut “kampus merdeka menghendaki terwujudnya kemerdekaan serta modernisasi pendidikan tinggi, yang berbasis revolusi industri 4.0, karena menjadikan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga minat juga bakat mereka mampu berkembang optimal, guna memperkuat kompetensi kewarganegaraan, agar inovasi serta keadaban mahasiswa bisa terwujud”.
- 3) Dikembangkannya kurikulum PKn pada kampus merdeka, yang berbasis penguatan kompetensi lulusan dan strategi pelayanan optimal dari program studi terhadap mahasiswa, melalui model Kolaborasi *Pentahelix*.
- 4) Dibangunnya *applied theory* pertama, sebagai penguat dari *grand theory* progresivisme, pada pendidikan tinggi, yaitu “keselarasan antara komitmen pemerintah serta Perguruan Tinggi untuk memenuhi hak-hak mahasiswa secara komprehensif, dengan keterlibatan mahasiswa untuk menjaga esensi kampus merdeka, begitu penting untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak mahasiswa sebagai bagian integral dari warga negara”.
- 5) Dibangunnya *applied theory* kedua, sebagai penguat *middle theory* Ki Hajar Dewantara juga Paulo Freire, dalam “orientasi pembelajaran di Perguruan Tinggi perlu berfokus pada upaya penguatan kompetensi kewarganegaraan,

agar komprehensif, dengan memberikan kemerdekaan mahasiswa untuk bereksplorasi, yang didukung oleh bimbingan dan pelayanan optimal, serta

5.2.2 Implikasi Praktis

- 1) Dirampungkannya kolaborasi *Pentahelix* untuk mengatasi pembelajaran PKn pada Perguruan Tinggi yang bersifat pragmatis juga prosedural, karena melibatkan berbagai pihak (pemerintah, kaum intelektual, masyarakat atau komunitas, swasta juga media).
- 2) Dirampungkannya rekomendasi pembelajaran PKn yang bersifat praktis di Perguruan Tinggi, yaitu pembelajaran PKn di masyarakat atau *citizenship education* sebagai gerakan filantropi (cinta, kesukarelaan dan kesadaran), selaku wahana penguatan kompetensi lulusan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pada upaya memenuhi hak-hak mahasiswa selaku bagian integral dari warga negara, perlu dilandasi oleh komitmen serta konsistensi pemerintah juga pengelola Perguruan Tinggi, agar bermanfaat positif bagi penguatan mutu sumber daya manusia Indonesia juga peningkatan inovasi mahasiswa.
- 4) Pelayanan optimal tidak sebatas profesionalisme, tetapi menjadi aktivitas akademik serta kemahasiswaan, yang mampu mengarah terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga melahirkan sikap saling menghormati, menghargai bahkan transformasi kasih sayang, antara pendidik juga peserta didik, dalam lingkungan akademik.
- 5) Realisasi kurikulum MBKM, perlu secara komprehensif mengimplementasikannya, yang tidak terbatas pada kegiatan akademik, tetapi juga pada kegiatan aktivitas berdemokrasi mahasiswa, serta pengembangan minat bakatnya, sebagai upaya mewujudkan keadaban mahasiswa, selaku warga negara muda.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi merupakan saran atau usul peneliti, yang diperoleh melalui mekanisme juga hasil penelitian, agar kampus merdeka, mampu bermanfaat positif untuk mengelola bonus demografi. Pada basisnya rekomendasi riset, akan diberikan pada setiap institusi yang terlibat, dosen dan mahasiswa, sebagai aktor penting dalam implementasi kampus merdeka. Terlebih kebijakan tersebut bersifat konsep yang mutu realisasinya begitu dipengaruhi oleh kekuatan institusi, dosen

dan mahasiswa dalam menerjemahkan kebijakan kampus merdeka. Sehingga untuk meminimalisir penerapan kampus merdeka yang sebatas seremonial, tentu rekomendasi risetnya akan dideskripsikan, sebagai berikut:

1) Kepada Para Pembuat Kebijakan

Pemerintah sebagai pembuat regulasi dan Kemendikbud sebagai penanggung jawab utama dalam realisasi kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM), perlu memastikan kebijakan tersebut berdampak nyata untuk mengelola bonus demografi nasional, agar bisa meningkatkan daya saing bangsa secara nasional dan internasional. Hal ini mewajibkan Kemendikbud berfokus untuk melakukan pendampingan, bimbingan teknis, dan juga pengawasan pada setiap Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia dengan situasi dan kondisi yang beragam. Tidak sebatas sosialisasi atau bimbingan teknis yang diberikan pada tingkat universitas saja, namu harus menyeluruh pada tingkat fakultas dan prodi. Sebagai pembuat kebijakan harus melakukan riset terlebih dahulu agar kebijakan yang dibuat bisa efektif. Perlunya sinkronisasi kalender kegiatan MBKM dari nasional dengan Perguruan Tinggi dan merekomendasikan mitra-mitra kerjasama untuk prodi tertentu yang sulit mengkonversi mata kuliahnya.

2) Kepada Para Pengguna Hasil Penelitian

Pengguna hasil penelitian ini merupakan unsur-unsur *Pentahelix*, yaitu, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, dan media. Untuk akademisi berperan aktif. Pada basisnya dosen memiliki peran penting untuk merealisasikan pembelajaran yang berkualitas dan demokratis, tentu dosen perlu menjamin bahwa konsep juga praktis pembelajaran berfokus pada mahasiswa, serta memberikan ruang mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menelaah suatu problematik yang berkaitan dengan konten pembelajaran. Terlebih dosen memiliki peran sebagai pembimbing mediator, serta fasilitator, sehingga mahasiswa bisa berkembang secara optimal. Tentu dukungan komunitas dan institusi, begitu penting, untuk menjadi wahana pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa, agar menjadi modal pengalaman juga keterampilan bagi mereka kelak nanti. Karena pembelajaran yang dilakukan melalui komunitas serta institusi tentu menjadi wahana strategis untuk menelaah distorsi antara teori yang diperoleh di dalam kelas, dengan realitas lapangan. Tentu komunitas dan institusi yang beragam, perlu

membantu mahasiswa dalam memperoleh pembelajaran nyata, terlebih posisi mereka sebagai calon pemimpin bangsa, sehingga mahasiswa perlu dibentuk kapasitasnya, agar mampu membawa bangsa menuju puncak peradabannya.

3) Dosen

Pada basisnya dosen memiliki peran penting untuk merealisasikan pembelajaran yang berkualitas dan demokratis, tentu dosen perlu menjamin bahwa konsep juga praktis pembelajaran berfokus pada mahasiswa, serta memberikan ruang mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menelaah suatu problematik yang berkaitan dengan konten pembelajaran. Terlebih dosen memiliki peran sebagai pembimbing mediator, serta fasilitator, sehingga mahasiswa bisa berkembang secara optimal. Walau pembelajaran berfokus pada mahasiswa, tetapi tidak otomatis menghilangkan peran dosen dalam pembelajaran, karena dosen dipandang berkompeten membantu mahasiswa untuk mencapai orientasi pembelajaran dan mengembangkan minat, bakat serta kepribadian mereka. Terlebih setelah diterapkannya kampus merdeka, yang memberi rekomendasi mengenai praktis pembelajaran yang beragam, tentu perlu menjadi motivasi untuk merealisasikan pembelajaran dinamis, berkualitas, partisipatif, kreatif, serta berdaya kritis bagi mahasiswa, melalui model, pendekatan dan strategi pembelajaran yang kapabel dan modern.

4) Mahasiswa

Sebagai subjek utama kebijakan kampus merdeka, tentu mahasiswa perlu memandang bahwa kampus merdeka, merupakan wahana strategis, untuk mengembangkan minat juga bakat mereka, sehingga mahasiswa perlu secara aktif untuk mengoptimalkan kampus merdeka. Tentu pada basisnya kampus merdeka, tidak hanya mengakomodir upaya penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, tetapi juga untuk peningkatan kualitas setiap Perguruan Tinggi di Indonesia, serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga kampus merdeka menjadi wahana strategis untuk merealisasikan idealisme, kesadaran, kesukarelaan, serta sikap filantropi mahasiswa, untuk mengabdikan pada masyarakat, bahkan memecahkan persoalan yang eksis di lingkungan sosial. Karena mahasiswa perlu menjaga dan merealisasikan idealismenya, sebagai praktis keterlibatan mereka pada kehidupan sosial juga politik, yang dinamis, akibat pentingnya keterlibatan

mereka, sebagai kekuatan politik penyeimbang kekuasaan rezim, agar demokrasi dan kesejahteraan konsisten dinikmati masyarakat, terlebih kampus merdeka, mengakomodir substansi tersebut.

5) Kepada Peneliti Berikutnya

Penelitian Pengembangan Kurikulum MBKM Model Kolaboratif *Pentahelix* pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena peneliti ingin mengungkap dan menggali terkait dengan Model kolaborasi *Pentahelix* Pengembangan kurikulum MBKM di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Karena penelitian ini hanya dilakukan pada satu lokasi saja yaitu program studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga tidak mampu menggambarkan cakupan yang lebih luas. Maka peneliti selanjutnya, akan lebih bijaksana apabila berfokus untuk meneliti substansi yang bersifat mendalam mengenai implementasi kampus merdeka dalam cakupan yang lebih luas di suatu Perguruan Tinggi. Tentu peneliti selanjutnya juga perlu menganalisis problematik pada kebijakan kampus merdeka berbasis keilmuannya, agar bisa mengatasi problematik tersebut, bahkan bisa mengembangkan kajian keilmuan dan pembelajaran setiap disiplin ilmu, sebagai bentuk kolaborasi dengan kampus merdeka. Penting bagi peneliti selanjutnya untuk memberi argumentasi berbasis hasil riset, agar praktis pembelajaran kampus merdeka bisa bermanfaat positif, baik bagi mahasiswa, lembaga juga masyarakat.